

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup Al-Ghazali

Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al- Ghazali Al-Thusi. Lahir pada tahun 450 H/ 1058 M di Ghazal, Thus, Provinsi Khurasan, Persia. Terdapat dua macam penulisan mengenai nama sebutan Al-Ghazali. Pertama itu ditulis dengan satu huruf “z” yaitu Al- Ghazali. Sedangkan yang kedua ditulis dengan dua huruf “z” atau dengan tasydid yaitu Al-Ghazzali. Tentang hal ini Ali al-Jumbulati Abdul Futuh at-Tuwaanisi berpendapat bahwa sebutan Al-Ghazali (dengan dua huruf “z”) dinisbatkan atau dikaitkan kepada pekerjaan ayahnya sebagai pemintal wol.¹

Orang tua Al-Ghazali suka belajar ilmu tasawuf, karena orang tuanya hanya ingin makan dari hasil usaha Al-Ghazali sendiri dari menenun wol. Orang tua Al-Ghazali dikenal karena kecintaannya selalu mendoakan agar Al-Ghazali kelak menjadi seorang ulama. Namun, kematiannya tidak memberikan kesempatan untuk menyaksikan kesuksesan Al-Ghazali sesuai dengan doanya. Sebelum kematian, orang tuanya menitipkan Al-Ghazali dengan saudaranya, kepada seorang sufi, sehingga ia akan menerima pendidikan dan bimbingan yang layak.²

Al-Ghazali dan saudaranya dikirim ke madrasah untuk menyediakan biaya hidup bagi murid mereka. Di pesantren inilah Al-Ghazali bertemu dengan Yusuf Al-Nassaj, seorang guru sufi terkenal saat itu. Dan disini titik awal perkembangan intelektual dan spiritual Al-Ghazali, yang akan mengantarkan Al-Ghazali menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam. Sepeninggal guru beliau, Al-Ghazali berguru kepada seorang ulama bernama Ahmad bin Muhammad Al-Razakanya Al-Thusi di Thus. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Ghazali adalah salah satu pemikir besar Islam dan filsafat manusia, dan dia juga orang yang serba bias. Al-Ghazali adalah seorang ahli ilmu hukum Islam pada masa itu, selain itu ia

¹ Muhammad Solikhudin, “Pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali Terhadap Dikotomi Ulama Dan Klasifikasi Pengetahuan (Studi Tentang Ihya’ Ulumuddin)”, *Empirisma: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 30 No. 1, (2021), h. 72.

² Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 155.

juga menguasai Fiqih, Ushul Fiqih, Kalam, Mantiq, Filsafat, Tasawuf, Akhlak dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam masing-masing disiplin ilmu ini, tulisan-tulisan Al-Ghazali sangat dalam, murni dan bernilai tinggi.³

Imam Al-Haramain (mantan gurunya) berkata: Al-Ghazali adalah lautan yang tak berujung. Dan salah seorang muridnya, Imam Muhammad bin Yahya, berkata: Al-Ghazali adalah asy-Syafi'i kedua. Salah seorang ulama sezamannya, Abu Al-Hasan Abdul Ghafir Al-Farisiy juga menyampaikan pujian, beliau mengatakan: Al-Ghazali adalah Hujjatul Islam bagi kaum Muslim, imam dari para imam agama, pribadi yang tidak pernah dilihat pada diri tokoh-tokoh selainya termasuk lisan, ucapan, kecerdasan, dan kepribadiannya. Tokoh-tokoh terbesar dalam sejarah reaksi islam Neo-Platonisme adalah Al-Ghazali seorang ahli hukum, teolog, filosof, dan sufi. Ayahnya adalah seorang Muslim keturunan ahli sufi. Karena pertemuan dengan Nizam Al-Mulk, perdana menteri Seljuk Sultan Maliksyah, nasib Al-Ghazali mengambil langkah yang menentukan.⁴

Kehidupan penting Al-Ghazali dapat dibagi menjadi tiga periode utama. Yang pertama yaitu masa studi, pertama di kota kelahirannya di Thus, Persia, kemudian di Gurgan dan akhirnya di Nishapur. Setelah kematian gurunya, Imam al-Haramain al-Juwaini, Al-Ghazali diakui oleh Nizam al-Mulk, yang merupakan wazir atau perdana menteri Sultan Seljuk, yang akhirnya diangkat sebagai kepala Perguruan Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484H/1091 M. Periode kedua kehidupan Al-Ghazali merupakan karir yang cemerlang sebagai dokter ortodoks peringkat tertinggi komunitas Islam di Baghdad 484-488 H/1091-1095 M. Periode ini singkat tapi signifikan. Saat itu beliau memberikan kuliah hukum Islam di perguruan tinggi. Dalam kekacauan politik setelah pembunuhan Nizam al-Mulk dan kematian kekerasan Sultan Maliksyah, berikutnya Al-Ghazali mengalami kemunduran spiritual yang serius dan akhirnya memutuskan pergi ke Baghdad, meninggalkan karir dan dunianya. Ini menandai awal dari periode ketiga hidup Al-Ghazali, yaitu sekitar tahun 488-505 H/1095-1111 M, namun ini juga termasuk periode singkat, di mana ia mengajar di Perguruan Nizamiyah di

³ Kholili Hasib, "Konsep Siyasa Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal Falasifa*, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 9.

⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Al-Ghazāli bainamaadihihiwa naqidihi*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 2012), h.24.

Nishapur. Setelah meninggalkan Baghdad, Al-Ghazali melakukan perjalanan sebagai sufi di Palestina dan Suriah sebelum kembali ke Thus. Ia terlibat dalam menulis buku, berlatih filsafat dan mengajar murid-muridnya sampai kematiannya.⁵

Pada tahun 484 H/1091 M, Nizam Al-Mulk memerintahkan Al-Ghazali untuk menjadi guru besar madrasah Nizhamiyyah yang ia dirikan di Bagdad. Al-Ghazali menjadi salah satu orang paling terkenal di Baghdad, Ia telah mengajar lebih dari 300 siswa selama empat tahun. Pada saat yang sama, Ia dengan antusias menekuni penelitian filosofis melalui membaca dan menulis banyak buku. Kuliah Al-Ghazali di bidang teologi dan hukum mencapai kesuksesan besar. Al-Ghazali memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah saat itu, yang sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintahan Abbasiyah pada masa al-Ma'mun sangat dipengaruhi oleh madzhab Mu'tazilah dan filsafat Yunani, dan Al-Ghazali mampu mengembalikannya ke ajaran Islam yang murni. Di bidang akidah, faham Asy'ari diajarkan, dan di bidang akhlak, tasawuf dikuatkan. Setelah tinggal di kediaman Perdana Menteri Mu'askar selama kurang lebih lima tahun, Al-Ghazali diminta untuk pindah ke Bagdad sebagai rektor Universitas Nizamiyah, dan menjadi pusat seluruh Universitas Nizamiyah. Al-Ghazali diminta menjabat sebagai rektor universitas tersebut karena rektor sebelumnya telah meninggal dunia.⁶

Di kota Baghdad, nama Al-Ghazali menjadi semakin populer, dan halaqah (kelompok) pengajian menjadi semakin luas. Di kota ini, ia juga mulai berdebat, terutama antara golongan Bathiniyah Islamiyah dan para filosof. Selama periode ini, ia juga mengalami krisis spiritual karena skepticisme, orang Barat menyebutnya skepticisme, yaitu krisis meragukan semua pengalaman dan akal. Kemudian dia meninggalkan semua posisi yang dia pegang di Bagdad, termasuk kepala sekolah dan profesor, dan dia mengembara ke Damaskus. Di Masjid Jami' di Damaskus, dia mengisolasi diri dari dunia untuk beribadah, kontemplasi dan tasawuf selama dua tahun. Kemudian pada

⁵ Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali Terhadap Dikotomi Ulama Dan Klasifikasi Ilmu Studi Tentang Ihya' Ulum Al-Din", *Empirisma, Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 30 No. 1, (2021), h. 72-73.

⁶ Sudarsosno, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 62.

tahun 490 H/1098 M, ia pergi ke Palestina untuk berdo'a di makam Nabi Ibrahim. Kemudian dia pergi ke Makkah dan Madinah untuk berhaji dan ke makam Nabi Muhammad. Akhirnya, ia terlepas dari goncangan jiwa melalui jalan tasawuf.⁷

Selama pengunduran dirinya di Damaskus dan Thus, Al-Ghazali menjalani kehidupan sebagai sufi yang miskin, selalu acuh tak acuh, menghabiskan waktu dalam meditasi dan pelatihan spiritual lainnya. Selama periode inilah ia menulis *Iḥyā' 'ulūm al-dīn*, yang merupakan karya utamanya tentang etika. Dalam *Iḥyā' 'ulūm al-dīn*, Al-Ghazali, pentingnya ulama sebagai figur sentral dinyatakan dengan jelas. Al-Ghazali dianugerahi gelar kehormatan Hujjat Al-Islam (Argumentasi Islam) sebagai pengakuan atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, khususnya pembelaan Batiniyat dan para filosof. Citra Al-Ghazali memiliki karakteristik yang luar biasa, beliau adalah seorang ulama, pendidik, pemikir intelektual, dan penulis yang produktif. Pemaparan yang sangat bagus, gaya bahasa juga sangat menarik, dan argumentasi yang disampaikan begitu kuat sehingga setiap ilmu yang ia tulis dapat dijadikan bukti. Pada tahun 499 H/1105-1106 M, putra Nizam Al-Mulk dan Wazir Sanjar, pemimpin Saljukiah dan Khurasan, menekankan Al-Ghazali guna kembali bekerja akademik. Dia menyerah pada penekanan ini, sebagian karena dia percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi seorang pembaharu agama pada awal abad baru, menurut hadits yang masyhur. Pada, bulan Dzulqa'dah/ Juli-Agustus 1106 M, Al-Ghazali mulai mengajar di Nizhamiyah di Nasyahbur, dan tak lama kemudian ia menulis karya *Al-Munqiz min al-Dalal wa al-Mufsih'anal-Ahwal*.⁸

Al-Ghazali meninggal di kota Thus, di Desanya Taberan, pada 14 Jumadil Akhir 505 H/19 Desember 1111 M. Ibn jauzi menjelaskan kisah kematiannya. Dia berkata: "Pada hari Senin pagi, sebelum fajar, dia bangun dari tempat tidur, melakukan sholat subuh, dan kemudian memerintahkan seseorang untuk membawakan kain kafan lalu menyerahkan kepada Al-Ghazali, mengangkat ke mata beliau, dan berkata: Setelah berbicara, dia mematuhi takdir, meluruskan kaki beliau, dan menghadap kiblat. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas untuk terakhir

⁷ Yusuf Al-Qardowi, *Al-Ghazāli baina maadihihi wa naqidihi*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 2012), h. 46.

⁸ Yusuf Al-Qardowi, *Al-Ghazāli baina maadihihi wa naqidihi*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 2012), h. 49.

kalinya”. Dia meninggal sebelum langit menguning (menjelang pagi). Al-Ghazali meninggalkan 3 putri dan seorang putra (Hamid) yang lebih dulu meninggalkan Al-Ghazali⁹

Selama hidup Al-Ghazali yang panjang, dengan banyak masalah, berikut adalah karya yang dibuat oleh Al-Ghazali. Di masa kecilnya, Al-Ghazali berguru kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Raziqani di Thus, kemudian dengan Abi Nasr Al-Isma'ili di Jurjani, dan akhirnya kembali ke Thus. Setelah itu, Al-Ghazali pindah ke Neysaburi, di mana ia belajar di bawah bimbingan seorang ahli agama terkenal saat itu, Al-Juwaini, yang bergelar Imam Haramin, darinya Al-Ghazali belajar ilmu kalam, ilmu ushul dan ilmu agama lainnya. Dan Al-Ghazali sering berdiskusi dengan sekelompok ulama dan intelektual di depan Nizam Al-Mulk, yang memberinya nilai lebih.¹⁰

Nidzham Al-Mulk berjanji akan mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar di universitas yang didirikannya di Baghdad pada tahun 484/1091 M. Setelah itu, dia pergi ke Syam dan tinggal di Jami Umawi. Dia penuh dengan ibadah dan melanjutkan gurun pasir untuk pergi meninggalkan hidup mewah dan mendalami agama. Dari sana ia kembali ke Bagdad untuk melanjutkan mengajar. Selain mengajar, ia juga rajin menulis buku. Setelah 10 tahun di Baghdad, ia pergi ke Nasyaburi untuk mengajar di sana. Dengan mempelajari berbagai filsafat, termasuk pandangan filsafat Yunani dan filosof Islam, Al-Ghazali menemukan argumentasi yang lemah, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumentasi para filosof Yunani dan Islam dalam beberapa hal. Diantaranya, Al-Ghazali menyerang tulisan Aristoteles tentang asal usul alam dan pandangan filosof bahwa Tuhan tidak mengetahui detail alam tetapi hanya mengetahui peristiwa besar. Ia juga menentang argumentasi para filosof bahwa kepastian hukum hanya sebab akibat, dan tidak boleh ada penyimpangan. Saat itu, ratusan ulama, pejabat khalifah, dan para bangsawan yang berkuasa turut serta dalam perkuliahan Al-Ghazali yang disampaikan dengan penuh pemikiran, kontroversi,

⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Buku Pertama: Biografi Imam Al-Ghazali, Ilmu, Iman, Terj. Purwanto, Ed. Irwan Kurniawan, Cet.1, (Bandung: Marja, 2014), h. 13-14.

¹⁰ Sulaiman Dunya menjelaskan hal ini dalam kata pengantar terjemah Kitab *Tahafut al Falasifah*, (Bandung: Marja, 2010), h.19.

dan nalar. Sebagian besar bahan perkuliahannya kemudian dicatat oleh Sayyaid bin Fariz dan Ibn Lukban. Keduanya mencatat kurang lebih 183 bahan kuliah kemudian dihimpun dalam sebuah kitab yang berjudul *Al-Majalis Al-Ghazzalīyah*.¹¹

Pikiran imam besar kemudian beralih ke pengajaran ketinggian spiritual. Keadaan dan alasan yang mendorongnya melakukan usaha ini tertulis dalam bukunya *Al-Munqiz min al-Dalal wa al-Mufsih'an al-Ahwal* (selepas dari kesesatan). Ketika dia muda, dia adalah pengikut Imam Syafi'i, tetapi di Baghdad dia bergaul dengan banyak orang dari berbagai mazhab fiqih, pemikiran dan gagasan: Syafi'i, Sunni, Zindich, Majusi Teolog Skolastik, Kristen, Yahudi, Ateis, penyembah api, dan Bahala. Selain itu, ada deis, materialis, naturalis, dan filsuf di Baghdad. Mereka sering bertemu dalam perdebatan. Hal ini sangat mempengaruhi pemikiran Al-Ghazali, sehingga seluruh hidupnya mengalami perubahan yang menggemparkan, dan ia mulai mencari kebenaran melalui nalar bebas.¹²

Ide-ide lamanya mulai memudar, dan dia mulai hidup dalam keraguan dan kecemasan. Kemudian ia condong ke arah tasawuf. Tetapi di sini, praktik yang sebenarnya lebih direfleksikan daripada keyakinan murni. Terinspirasi oleh ide ini, ia meninggalkan posisinya yang menonjol di Bagdad. Suatu malam di tahun 488 M, mengenakan pakaian sufi menyelip keluar dari Bagdad. Al-Ghazali menerima gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap Islam, terutama terhadap kaum bathiniyyah dan para filosof. Dalam setiap periode hidupnya, Al-Ghazali terus menulis. Hasilnya, karyanya telah menerbitkan ratusan buku dan dijadikan pedoman oleh sebagian umat Islam. Namun, karena luasnya ilmu yang dimilikinya, sulit untuk menentukan bidang dan profesinya. Zainal Abidin Ahmad mengatakan dalam bidang karang mengarang, Al-Ghazali dikenal sebagai penulis yang serba bisa. Di semua bidang, ia menulis secara ekstensif dan akurat, dan sangat mendalam, sehingga ia ahli dalam bidang semua aspek.¹³

¹¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t), Juz. II h. 381.

¹² Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Buku Pertama: Biografi Imam Al-Ghazali, Ilmu, Iman, Terj. Purwanto, Ed. Irwan Kurniawan, Cet.1, (Bandung: Marja, 2014), h. 11-12.

¹³ Yusuf Al-Qardawi, *Al-Ghazali baina maadhihihi wa naqidihi*, (Kairo, Maktabah Wahbah, 2012), h. 52.

B. Karya-Karya Al-Ghazali

Karyanya terdiri dari berbagai ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam:

No.	Bidang	Karya	Keterangan
1.	Filsafat	<i>Maqāsidal-Falāsifah</i>	Karya pertama yang ditulis sewaktu pikirannya masih segar dalam usia muda sekitar 25-28 tahun. Isinya menerangkan terkait filsafat menurut wajarnya, tanpa kecaman.
2.	Filsafat	<i>Tahāfutal-Falāsifah</i>	Karyanya sewaktu dia berada di Baghdad, dalam kekacauan oleh paham skeptis yang sangat hebat, dalam usia 35-38 tahun. Buku ini tentang kecaman yang sangat hebat terhadap ilmu filsafat yang sudah menggemparkan ilmu pengetahuan.
3.	Filsafat	<i>Al-Ma'arif al-Aqliyyah wa Lubābal-Hikmahal-Ilahiyyah</i>	Naskah buku ini terdapat di perpustakaan Lytton di Aligarh University, India dan perpustakaan Kotapraja di Iskandaiyah. Buku itu diterbitkan oleh Darul Fikri di Damaskus pada tahun 1963 di bawah penelitian Abdul Karim al-Utsman. Buku ini berisi asal-usul ilmu yang rasional serta hakekat dan tujuan yang dihasilkannya.
4.	Tasawuf	<i>Ihyā' Ulūm Al-Dīn</i>	Kitab ini dikarang setelah Al-Ghazali kembali ke Naisabur pada usia 50 tahun, setelah skeptisnya habis dan jiwanya tenang kembali. Kitab ini yang menjadi pegangan umat Islam sampai hingga sekarang,

			dan merupakan jalan keluar dari berbagai aliran dan paham.
5.	Tasawuf	<i>Al-Munqiz min al-Dalal wa al Mufsih 'anal -Ahwal</i>	Kitab ini dikarang setelah tiga puluh tahun dalam kebingungan dan merupakan sumber dari kehidupan Al-Ghazali. Sebuah kitab yang berisi tentang autobiografi, namun bukan hanya autobiografi. Ia memberi suatu analisa yang intelektual tentang perkembangan spirituilnya, dan juga memberi alasan-alasan didalam memberikan pandangan bahwa terdapat suatu pengertian yang lebih tinggi dari pengertian rasional, yaitu kepada para Nabi ketika Tuhan mengungkapkan kebenaran kepadanya.
6.	Tasawuf	<i>Minhājal-Abidin</i>	Kitab ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Ghazali dan berisi tentang nasihat yang terakhir untuk manusia. Kitab ini diterbitkan di Mesir berulang kali, terdapat tulisan tangan di Paris, Berlin, dan al-Jazair. Kitab ini ada ringkasandan syarahnya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki.
7.	Tasawuf	<i>Mizānal-Amal</i>	Kitab ini mendampingi kitab Ihya' Ulumuddin bahkan isinya lebih teliti dan merupakan kesimpulan dari kitab Ihya' Ulumuddin. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa kebanyakan isi dari kitab ini menggunakan tasawuf.

8.	Tasawuf	<i>Kimiya as-Sa'adah</i>	Dalam kitab ini terdapat beberapa persoalan etika yang dibicarakan dari perspektif praktis dan agama. Kitab ini telah banyak diterbitkan sebagai ilmu moral Islam, tetapi sebenarnya mengandung lebih banyak uraian-uraian secara praktis menurut hukum dari pada ilmu moral secara ilmiah atau filsafat.
9.	Tasawuf	<i>Kitabal-Arba'in fi Usul-Din</i>	Kitab ini berisi prinsip-prinsip agama tentang mengenai soal akhlak dan tasawuf.
10.	Tasawuf	<i>At-Tibrul Mabsuk fi Nasihatil Muluk</i>	Artinya, emas yang telah ditata guna menasihati para penguasa. Kitab ini berisikan akhlak dalam hubungannya dengan pemerintahan.
11.	Tasawuf	<i>Misykatal-Anwar</i>	Artinya, lampu yang bersinar banyak. Kitab ini berisi tentang ilmu akhlak dalam hubungannya dengan ilmu akidah dan keimanan.
12.	Tasawuf	<i>Ayyuhaal-Walad</i>	Kitab ini berisikan nasihat yang ia tulis untuk seorang temannya yang berisi tentang amal perbuatan serta tingkah laku sehari-hari dan banyak membahas tentang proses belajar.
13.	Tasawuf	<i>Al-Adab fiddin</i>	Artinya, Adab sopan keagamaan. Kitab ini membahas tentang akhlak di dalam hubungannya dengan etika kehidupan manusia.
14.	Tasawuf	<i>Al Risalah al-Laduniyyah</i>	Artinya, Risalah tentang soal-soal bathin. Kitab ini membahas tentang hubungan akhlak dengan kerohanian, termasuk soal-soal bisikan

			kalbu, wahyu, dan lainnya.
15	Politik	<i>al-Mustazhiri fi al-Radd 'ala al Bātiniyyah</i>	Kitab ini dikarang pada tahun 488 H. di Baghdad atas perintah dari khalifah Al-Muqtadi yang baru dinobatkan setahun sebelumnya. Isi kitab ini membongkar prinsip politik yang berbahaya dari partai ilegal Syi'ah Bathiniyah pada saat itu.
16	Politik	<i>Fatihatul Ulum</i>	Kitab ini adalah guna membuka pintu berbagai ilmu pengetahuan, seperti yang tercantum pada namanya. Namun dalam beberapa bagiannya terdapat pembahasan tentang ilmu politik.
18	Politik	<i>Al-Iqtisādfial-I'tiqad</i>	Kitab ini terkait dasar-dasar keimanan yang harus dimiliki oleh seorang pemegang pemerintahan. Kitab ini juga membahas tentang politik pemerintahan terkait soal-soal teologi.
19	Politik	<i>Suluk as-Sulthaniyyah</i>	Kitab ini berisi bimbingan bagi kepala Negara dalam memerintahkan roda pemerintahannya.
20	Politik	<i>Bidāyatal-Hidayah</i>	Kitab ini berisi ajaran adab dan kesopanan dalam hidup manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, ataupun kaitannya dengan masyarakat, termasuk soal pemerintahan.

Tabel. 4.1 Karya-karya Al-ghazali

C. Pandangan Al-Ghazali pada Bidang Sosial Politik

Ide-ide politik Al-Ghazali seperti halnya konsep atau tipe pemimpin ideal akan ditekankan di sini. Kepemimpinan

merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi atau negara. Kepemimpinan adalah bentuk pengabdian dan tanggung jawab terhadap prinsip-prinsip iman. Dalam Islam, pemimpin yang ideal adalah teladan Nabi Muhammad, pemimpin yang bertindak dalam banyak hal, dan pemimpin yang dijadikan teladan oleh semua orang, namun banyak pemimpin saat ini yang menyimpang dari keteladanan Nabi Muhammad.¹⁴

Al-Ghazali memiliki konsep kepemimpinan yang lebih dalam dan menekankan agama yang substansial, bentuk dan lambang nilai ajaran, hal yang menyatu telah dipisahkan dari citra pemimpin, dan pemimpin harus berasal dari rakyat dan pilihan rakyat. Menurut Al-Ghazali, tipe pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang beretika, yang dikenal sebagai pemimpin sejati, pemimpin yang tidak memihak, serta memiliki integritas dan kecakapan dalam bidang ilmu pengetahuan nasional dan agama. Selain pemimpin ideal, Al-Ghazali juga memiliki gagasan politik lain, seperti adab yang berkuasa, yakni *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Ide-ide politik utama Al-Ghazali dituangkan dalam bukunya *At-Tibrul Mabsuk fi Nasihatil Muluk*. Pada masanya, Al-Ghazali mencoba memposisikan diri sebagai agen perubahan untuk perbaikan pemerintahan. Saat itu, ia dalam posisi ulama dan wajib mengarahkan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk kepada *umara'*, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai mitra dalam menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Karena Al-Ghazali melihat kondisi pada saat Dinasti Saljuk mengalami penyelewengan wewenang ketidak disiplin moral sultan pada saat itu sangat memperhatikan.¹⁵

Poin penting dari putusan ini adalah pertama, Al-Ghazali lebih mengutamakan kekuatan tauhid, dan kedua memberikan nasehat moral, keadilan, dan keutamaan intelektual, daripada ulama. Al-Ghazali meyakini bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan penyelenggara negara. Kemudian ada pemikiran Al-Ghazali tentang politik yaitu urgensi negara. Al-Ghazali berpendapat bahwa harus ada bentuk pemerintahan Islam. Jika tidak, maka pemerintah akan memegang kekuasaan publik, yang akan menimbulkan

¹⁴ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 160.

¹⁵ “Konsep Siyasa Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali”, *Jurnal Falasifah*, Vol. 8 No. 1, (2017), h. 6.

kekacauan, permusuhan, pertumpahan darah, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi di masyarakat.¹⁶

Menurut Al-Ghazali, politik tidak hanya bertujuan untuk menghindari keresahan sosial melalui penegakan hukum dan ketertiban dalam administrasi publik oleh agen-agen negara, tetapi juga bertujuan untuk menghindari keresahan sosial melalui pembinaan dan kepemimpinan penguasa untuk memberikan pelayanan yang menarik. Untuk itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya penguasaan ilmu yang benar. Semuanya harus dilakukan melalui pengamalan syariah. Penerapan syariat membutuhkan dukungan yaitu legitimasi negara. Agama mencakup aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk aspek moral dan spiritual kehidupan. Oleh karena itu, pembentukan negara dan pengangkatan imam menurut tujuan utama Al-Ghazali adalah untuk menghasilkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat. Negara dan politik merupakan komponen penting, terutama dalam tema sentralnya, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Agama adalah poros, penguasa adalah penjaga, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya pasti akan hancur.¹⁷

Berikut ini beberapa karya Al-Ghazali yang mempunyai point penting tentang pemikiran Al-Ghazali di bidang politik:

a. Al-Mustadzhiri

Isi kandungan dalam karya ini yaitu Kitab ini di karang pada tahun 488 H. di Baghdad atas perintah dari khalifah al-Muqtadi. Isi kitab ini yaitu membongkar prinsip-prinsip politik yang berbahaya dari partai ilegal Syi'ah Bathiniyah pada saat itu.

b. Suluk as-Sulthaniyah

Kitab ini tentang bimbingan untuk kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahannya.¹⁸

Al-Ghazali telah memberlakukan prinsip pengabdian dalam mengajar, baik terhadap *umara'* ataupun pada tokoh masyarakat dan ulama, sehingga orang yang akan mengajar harus memantapkan dan meluruskan niatnya hanya untuk mendapatkan

¹⁶ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 167.

¹⁷ "Konsep Siyasa Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali", *Jurnal Falasifah*, Vol. 8 No. 1, (2017), h. 11.

¹⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 74-86.

keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Disinilah peran *umara'* sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum yang berlaku dan juga menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ulama dipandang menempati posisi dan memegang otoritas keagamaan. Oleh karena itu, ulama menempati tempat yang sangat penting dalam Islam dan kehidupan masyarakat Muslim. Hubungan antara ulama dengan *umara'* dalam Islam memiliki interpretasi yang cukup banyak, meskipun Islam diyakini dapat menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata negara dan politik. Semua ini tidak terlepas dari pemikiran paradigmatis para ahli tentang relasi antara ulama dengan *umara'*.¹⁹

Bagi Al-Ghazali, krisis yang menimpa suatu negara dan masyarakat berakar dari kerusakan yang menimpa para ulamanya. Karena itu, reformasi yang dilakukan dimulai dengan memperbaiki para ulama. Selain itu dalam pandangan Al-Ghazali, pemimpin negara tidak boleh dipisah dari ulama. Ulama tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana agama tidak boleh ditinggalkan oleh negara. Ulama pun harus memberikan nasihat dan peringatan terutama akidah dan adab kepada *umara'*.²⁰

Usaha-usaha perbaikan politik yang dilakukan Al-Ghazali dengan menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada ulama sekaligus kepada *umara'*. Tahapan usaha yang dilakukan yaitu peringatan, lalu nasehat-nasehat agama. Al-Ghazali sangat berkomitmen pada faktor perbaikan dan pembaharuan. Seorang ulama semestinya melakukan reformasi konstruktif guna kebaikan politik di negara. Mereka tidak boleh diam, karena ini merupakan bentuk dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Al-Ghazali telah menunjukkan dirinya sebagai ulama yang mempunyai pemikiran cemerlang, yang disegani dan diterima oleh para pejabat negara serta para ulama lain pada zamannya. Kepada *umara'*, ia memberi nasihat bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan adab guna

¹⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Al-Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 95.

²⁰ Mudrik Al Farizi, "Konfigurasi Pemikiran Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia", *Al Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 10, No. 2, (2016), h. 13.

kemaslahatan bersama dengan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi ditopang dengan kekuatan syariah.²¹

Al-Ghazali memprioritaskan pada kekuatan akidah tauhid yang berisi naihah-nasihah moral, keadilan keutamaan ilmu. Dalam nasihatnya, Al-Ghazali memulai dengan kaidah-kaidah iman. Disamping menginginkan *umara'* tetap loyal pada keimanan yang benar, Al-Ghazali mengingatkan *umara'* bahwa kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah Allah. Dalam hal ini, Al-Ghazali memberi peringatan bahwa kekuasaan hanyalah titipan Allah. Allah memberi amanah kepada *umara'* guna menstabilkan negeri sesuai dengan syariat-Nya.²²

Meskipun menulis banyak masalah tashawuf Al-Ghazali tetap peduli dengan jalannya kekuasaan. Ia selalu menasehati para penguasa, agar selalu menegakkan Tauhid. Nasihat Tauhid ini dimaksudkan guna melindungi *umara'* agar tidak terpengaruh dengan pemikiran Syi'ah Batiniyah yang berkembang pada zaman itu. Kelompok Batiniyah ini terkenal sebagai kelompok radikal.²³

D. Harmonisasi Ulama dengan *Umara'* pada Kehidupan Al-Ghazali

Jauh sebelum Al-Ghazali lahir, yakni sejak abad ke-9 M, Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Negara itu mulai dikuasai oleh Turki dan terus dikuasai oleh Buwaih. Sejak 1055 M, Bani Abbasiyah berada di bawah kendali Seljuk. Selama era Al-Ghazali, banyak politik yang menyimpang dari jalur hukum Islam, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis ulama. Kritik tajam Al-Ghazali saat itu ditujukan kepada para ulama yang benar-benar terpikat oleh ambisi duniawi. Ulama yang seharusnya menjadi penasihat penguasa, tidak menjalankan tugas dengan benar. Pada era Al-Ghazali, hubungan ulama dan *umara'* dapat dilihat dalam perkembangan keilmuan pada masa pemerintahan Nizam al-Mulk. Dalam pembangunan madrasah

²¹ Sholeh Fikri, "Posisi Ulama Dalam Pemerintahan Kota Padangsidempuan", *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (2016), h. 6.

²² baca Abu Hamid Al-Ghazali, *Fada'ih al-Batiniyah*, (t.t) h. 11.

²³ Zaprul Khan, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Walisongo*, Vol. 22, No. 1, (2014), h. 122.

Nizam al-Mulk, wakaf diberikan untuk mendanai mudarris, imam, dan siswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama.²⁴

Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dalam proses sejarahnya, dan kehidupan politik seringkali melahirkan benih-benih konflik internal dan eksternal. Sejak Khalifah Usman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah Bin Abu Sufyan. Sejak pecahnya perselisihan di Mu'awiyah bin Abi Sufyan, benih-benih konflik antar umat Islam sudah jelas muncul. dan pada saat inilah umat Islam berselisih dalam dua medan, yaitu *ushul* (teologi) dan *imamah* (politik). Namun umat Islam sendiri, setelah Tahun Perdamaian (*Am al-Jama'ah*) yang dipelopori oleh Hassan bin Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, tidak tertipu ke dalam emosional di atas. Mereka menarik diri dari arena politik yang sebenarnya dan beralih ke dunia ilmu pengetahuan dan dakwah. Meskipun hal ini membawa pengecualian, yaitu munculnya dualisme dalam kepemimpinan umat, yaitu ulama dan *umara'*, namun dengan cara ini kemurnian Islam dan objektivitas ilmu dapat dipertahankan hingga saat ini, disamping tercapainya kemajuan ilmu dan dakwah. Para penerus ini kemudian dikenal sebagai *Ahl as-Sunnah Wa al-Jama'ah*, dan salah satunya adalah Al-Ghazali.²⁵

Sepanjang Daulat Dinasti Abbasiyah, karena perbedaan pemahaman dan ideologi, persaingan dan konflik terjadi antara Bani Abbas dan Syi'ah-Mu'tazilah. Bahkan krisis politik dinasti Abbasiyah yang sangat pelik memaksa otoritas eksklusif. Khilafah Abbasiyah ke tangan Sultan-sultan, yang membagi wilayah Abbasiyah menjadi beberapa kesultanan yang independen. Pada saat yang sama, Al-Ghazali masih fokus menggali dan mencari ilmu yaqini di Syam dan sekitarnya. Ia sendiri menganggap bahwa masa ini adalah masa berhenti dari guru agama, dimana ilmu-ilmu agama sudah mati, sehingga perlu dilakukan pembaharuan atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali hidup dalam

²⁴ Abudin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri kajian Filasafat Pendidikan Islam*, (2012), h. 57.

²⁵ Nurseri Hasnah Nasution, "Komunikasi Dakwah Ulama Sumatera Selatan (Studi Terhadap Jenis-Jenis Komunikasi Dakwah K. H. Muhammad Zen Syukri)", *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)*, Vol. 2, No. 1, (2018), h. 32.

suasana dan negara Islam pada waktu itu mengalami kemunduran dalam beberapa aspeknya.²⁶

Pada era Al-Ghazali, pemahaman umat Islam tidak hanya muncul di ranah politik, tetapi juga di ranah sosial dan keagamaan. Umat Islam kala itu terbagi dalam beberapa kelompok aliran fiqih dan kalam, yang masing-masing aliran memiliki karakter ulamanya masing-masing, dan mereka secara sadar menanamkan fanatisme pada masyarakat. Terkadang ini juga dilakukan oleh pihak penguasa. Penanaman fanatisme mazhab juga melibatkan banyak para ulama. Hal ini erat kaitannya dengan status ulama yang menempati stratifikasi sosial tertinggi dari status *umara'*. Ini karena penguasa dan ulama saling bergantung. Dengan peran ulama, *umara'* dapat memperoleh legitimasi tertentu di mata rakyat atas kekuasaannya, sebaliknya dengan peran *umara'*, ulama dapat memperoleh status dan kehormatan dalam kehidupan yang mewah. Maka para ulama bergegas untuk mendekati *umara'*, begitu juga sebaliknya. Konflik sosial antar umat Islam di era Al-Ghazali berawal dari perbedaan persepsi doktrin agama, sebenarnya bersumber dari pengaruh berbagai budaya non-Islam yang telah ada berabad-abad yang lalu terhadap Islam, dan pengaruh tersebut secara spesifik tercermin dalam membentuk berbagai aliran dan paham keagamaan. Pemahaman agama dari berbagai denominasi dan agama bertentangan dalam beberapa hal.²⁷

Filsafat saat itu bukan hanya konsumsi elit intelektual, tetapi juga konsumsi massa. Beberapa orang bahkan menerima kebenaran mutlak pemikiran filsafat dan cenderung meremehkan doktrin dan praktik agama. Adapun Mu'tazilah, selain banyak menyerap filsafat Yunani, juga merupakan mazhab yang banyak menimbulkan penderitaan bagi golongan Ahlussunnah dalam sejarah, baik pada masa Dinasti Buwaihi maupun pada masa al-Kunduri. Oleh karena itu, menurut penilaian para ulama dan *umara'* yang menganut hadits, filsafat dan mu'tazilah merupakan musuh utama yang harus dihadapi bersama. Dalam keadaan dan masa inilah Al-Ghazali lahir dan berkembang menjadi seorang pemikir terkemuka dalam sejarah. Al-Ghazali mencetuskan awal atau landasan ajarannya tentang korupsi ulama dan *umara'* pada

²⁶ Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Mizan, 2010), h. 35.

²⁷ Hermawan, A. Heris dan Yaya Sunarya, *Filsafat*, (Bandung: CV Insan Mandiri, 2011), h. 91-92.

masanya. Oleh karena itu, ia harus mempelajari situasi sosial politik saat itu, dan memberikan saran kepada para penguasa, agar apa yang dilakukan para penguasa sesuai dengan tujuan utama mereka. keberadaan ulama dan *umara'* mendapatkan proporsi yang ideal. Hal-hal yang menyangkut urusan penyelenggaraan negara, administrasi pemerintahan, dan ketahanan bangsa lebih menjadi domain para *umara'*. Umat wajib mengikuti dan menaati ketentuan tersebut. Jika seruan, perintah, atau larangan ulama dilanggar maka bermasalah di dunia dan akhirat, sebaliknya jika seruan, perintah, dan larangan *umara'* dilanggar maka akan mendapat hukuman dunia. Semakin baik dan harmonis hubungan antara ulama, *umara'*, dan umat maka semakin ideal kehidupan. Sebaliknya semakin tidak stabil hubungan antara ulama dengan *umara'* maka semakin rusak kehidupan umat. Hubungan ideal tersebut dapat diukur berdasarkan konsistensi ulama dan *umara'* dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing.²⁸

E. Relasi Ulama dengan *Umara'* dalam Perspektif Al-Ghazali

Konflik sosial antar umat Islam pada masa Al-Ghazali sebenarnya merupakan warisan masa lalu, yang berlangsung hingga beberapa abad berikutnya, karena tidak ada kesamaan pandangan di kalangan intelektual, setidaknya mereka tidak boleh memaksakan kehendak atau pemahaman tertentu kepada masyarakat lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa para penguasa pada saat itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan.²⁹ Oleh karena itu, para ulama saling bersaing dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Namun, tujuan mereka tidak hanya untuk pengembangan ilmu itu sendiri, tetapi juga untuk simpati penguasa, yang selalu memantau kemajuan mereka untuk direkrut ke posisi jabatan intelektual yang menguntungkan. Konflik sosial antar umat Islam di era Al-Ghazali berawal dari perbedaan kognisi doktrin agama, bahkan berawal dari pengaruh berbagai budaya non-Islam yang ada berabad-abad yang lalu dan

²⁸ Ahmad Nur Ismail, "Ulama Dan Pendidikan Islam Klasik (Kajian Ulama, Status Sosial, Kekuasaan, Pendidikan, Dan Gerakan Intelektual)", *Jurnal Media Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1, (2014), h. 91.

²⁹ Sudarsono, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 62.

kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk. Berbagai pemahaman agama saling bertentangan dalam beberapa hal.³⁰

Al-Ghazali berkata: “ulama itu terdiri dari tiga golongan: pertama, ulama yang merusak diri sendiri dan orang lain. Mereka adalah ulama yang terang-terangan mencari dunia dan rakus padanya. Kedua, ulama yang membahagiakan diri sendiri dan orang lain. ulama yang menyeru manusia kepada Allah lahir dan batin. Ketiga ulama yang menghancurkan diri sendiri dan menyenangkan orang lain. Mereka adalah ulama yang mengajak jalan akhirat. Mereka menolak dunia luar, tetapi ingin dihormati orang lain dan kedudukan yang mulia dalam hati mereka, jadi lihatlah pada golongan mana anda berada”.³¹

Berdasarkan semua peringatan Al-Ghazali di atas, ada fakta bahwa kerusakan yang terlihat pada negara-negara Muslim sebenarnya disebabkan oleh para ulama. Mereka adalah penyebab utama kehancuran negara karena mereka adalah garam rakyat, jika garam dihancurkan, apa kekuatan dan tujuan sebuah negara. Secara keseluruhan, *Ihyā’ ‘ulūm al-dīn* menjelaskan ketika disimpulkan bahwa seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya dan menunjukkan jalan yang benar bagi siapa saja yang membutuhkan, ia menjelaskan tentang peringatan tersebut kepada siapapun yang membutuhkan jalan yang benar.

Al-Ghazali mengatakan bahwa hubungan ulama dengan *umara’* diibaratkan ulama sebagai guru dan *umara’* sebagai murid. Dengan demikian jika ulama menasihati *umara’*, lalu mematuhi nasihat tersebut, maka dapat dikatakan wujud cinta negara dari dua pihak. Kepatuhan *umara’* pada ulama sama seperti kepatuhan murid pada gurunya. Dia harus berdiri teguh pada prinsip dan tujuan hukum Islam murni serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Ulama harus mengetahui posisi perselisihan atau kesepakatan antara semua ulama. Dan ulama merupakan orang yang tugasnya menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada semua orang, mengajak mereka untuk mengamalkannya, dan memberikan kepemimpinan dalam bahasa yang mereka pahami. Selain itu, ulama adalah kekuatan pendorong utama yang membawa seluruh umat manusia dari

³⁰ Al-Ghazali, *Intisari Ihyā’ Ulumuddin*, Terj. Junaidi Ismail, (Jakarta: Serambi Semesta Distribusi, 2016), h. 51.

³¹ Safuan Alfandi, *Ihya’ Ulumuddin Imam Al-Ghazali Filsafat Ilmu dan Kesucian Hati di Bidang Insan dan Lisan*, (Solo: Sendang Ilmu, 2019), h. 193.

kegelapan kebodohan ke cahaya pengetahuan, membebaskan mereka dari belenggu takhayul dan kemewahan. Oleh sebab itu, amat tepat lah adanya suatu peribahasa yang berbunyi: “Tidaklah seorang alim itu dapat disebut orang alim sehingga tampak nyatalah bekas ilmunya itu dikalangan kaumnya”.³²

Para penguasa tidak pernah lepas terhadap kritik dan saran dari para ulama, meskipun pada umumnya mereka menjalankan pemerintahan menurut hukum Islam, menegakkan hukum, memperhatikan urusan pokok umat Islam, dan melakukan jihad. Karena para penguasa di sini harus diawasi dan selalu memberikan nasehat ketika mereka menyimpang atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya mengurus negara, dan para pemimpin mereka harus siap membantu para ulama menghadapi masalah mereka. Bantuan ini diberikan dalam bentuk dorongan materi dan memberikan apa yang dibutuhkan ulama dalam urusan mereka. Bisa jadi hubungan ulama dan *umara'* disini tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, dan tidak ada lagi keharmonisan, karena tujuan dan fungsi ulama dan *umara'*, lambat laun akan hilang dengan kepentingannya masing-masing. *Umara'* adalah untuk kepentingan negara atau urusan politik, sedangkan ulama yang membidangi urusan agama, berdakwah secara keras sehingga bertentangan dengan ideologi negara.³³

Dalam hal ini, pemikiran Al-Ghazali tentang hubungan ulama dan *umara'* memiliki tujuan utama dalam sistem pemerintahan pada masanya. Ulama harus menjadi figur sentral penguasa, sebagai pusat penguasa, mencari bimbingan dan nasihat ketika mereka menjalankan posisi kepemimpinan mereka, dan memungkinkan ulama untuk datang ke *umara'* dengan dalih hukum agama dan legitimasi agama lain dan sikap *umara'* saat menyambut ulama haruslah akhlak yang baik.³⁴

F. Realitas Hubungan Ulama dengan Umara' di Indonesia

Perkembangan politik Indonesia menunjukkan bahwa agama merupakan sistem politik terpenting dalam sistem Pancasila. Karena politisi berusaha berkonsentrasi secara langsung atau

³² Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin Bimbingan untuk Mencapai Tingkat Mu'min*, Terj. Abdai Rathomy, (Bandung: Diponegoro, 2012), h. 10.

³³ Abd. Wahid, “Pola Peran Ulama Dalam Negara Di Aceh”, *Jurnal Madania*, Vol. 17, No. 1, (2013), h. 98.

³⁴ Jamauddin Al-Qasimi, *Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, (Bekasi: Darul Falah, 2010), h. 203.

tidak langsung dari agama atau mencari legitimasinya. Agama dijadikan sebagai sumber ketajaman moral dan keputusan terhadap umat, yang merupakan landasan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki keyakinan agama yang tinggi, sehingga mereka menganggap ulama sebagai figur yang harus diikuti. Tanpa adanya ulama, kehidupan masyarakat tidak akan berkembang lebih baik. Dewasa ini, para ulama diharapkan berperan dalam transisi menuju modernisasi. Namun, jika tidak ada pengembangan nilai-nilai agama, proses ini akan menimbulkan berbagai bahaya. Tanpa etika Islam yang seimbang, peradaban manusia di era teknologi akan hancur.

Pada masa transisi, Pembentukan BPUPKI merupakan langkah nyata yang pertama adalah untuk mengimplementasikan janji Perdana Menteri kepada Koso mengenai “Kemerdekaan Indonesia di Masa Depan”. Berarti pembentukan badan ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting sehubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 terletak di Gedung Chuo Sang In, di Pejambon. Lebih awal membentuk panitia kecil yang terdiri dari delapan orang di bawah pimpinan Ir. Soekarno, R. Oto Iskandar Dinata menjadi anggota panitia kecil ini bersama Drs. Moh Hatta, Soetardjo Hadikusumo, Moh. Yamin dan AA. Maramis, panitia kecil ini mengadakan pertemuan dengan para anggota BPUPKI yang kemudian melahirkan panitia sembilan. Panitia ini merumuskan tujuan berdirinya kemerdekaan negara Indonesia dalam suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Dalam sidang kedua, 10 Juli 1945, dibahas rencana UUD, R. Oto menjadi anggota panitia penyusun UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 7 Agustus 1945, ketika pertempuran semakin memuncak dalam kemerdekaan, sebuah komite dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zyumbi Linkai sebagai ganti BPUPKI. Ketuanya adalah Ir. Soekarno dengan Wakil Moh. Hatta. Jumlah anggotanya adalah 21 orang dipilih oleh Jenderal besar Terauchi, dimana R. Oto Iskandar Dinata salah satu anggotanya. Jadi jelas peran R. Oto Iskandar Dinata ini banyak perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.³⁵

Pada masa Orde Lama (1945-1966), setelah mengeluarkan dekrit, Sukarno yang sudah terobsesi menjadi penguasa mutlak di Indonesia, memaksa pembubaran Partai Masyumi pada tanggal

³⁵ Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan dalam Politik Islam”, *Dalam Jurnal Review Politik*, Vol. 2 No. 1, (2012), h. 11.

17 Agustus 1960. Penerapan Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno terbukti menimbulkan reaksi keagamaan dari partai Islam. Ahmad syafi'i ma'arif membagi era demokrasi. Hal ini menyebabkan Periode Kristalisasi dan Periode Kolaborasi. Periode Kristalisasi ditandai dengan, pro dan kontra. Sedangkan masa Kolaborasi yang ditandai dengan kerjasama partai-partai Islam dengan demokrasi terpimpin, termasuk dengan komunis, itulah salah satu pilar pendukungnya. Ulama dipandang sebagai salah satu unsur Nasakom bersama NU sebagai wakil utama, partai-partai Islam lainnya di menghadapi berbagai masalah politik meniru gaya lebih NU adalah kekuatan Islam terbesar saat itu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem Politik Islam pada masa demokrasi terpimpin terbagi menjadi: Ada dua periode, yaitu periode kristalisasi dan periode Kolaborasi. Periode kristalisasi ditandai dengan pemilihan teman dan musuh, pendukung dan penentang kebijakan Sukarno. Sedangkan masa kerjasama ditandai dengan kerjasama partai-partai Islam yang berpartisipasi dalam demokrasi terpimpin, antara lain: komunisme, yang merupakan salah satu pilar dukungan. Selama proses kolaborasi, ulama bekerjasama dengan Nasakom. Nasakom adalah singkatan dari Nasionalis, Religius dan Komunis. Masuknya partai Islam dalam kerjasama Nasakom, mereka secara resmi dianggap revolusioner. Pada saat itu, pertimbangan apakah kekuatan politik revolusioner atau kontra-revolusioner, akan sangat ditentukan oleh sikapnya melawan Nasakom. Semakin menonjol kekuatan *umara'* akan lebih dikategorikan revolusioner untuk menyelamatkan diri dari kecurigaan Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena ulama dipandang sebagai salah satu unsur Nasakom dengan NU sebagai wakil utamanya.³⁶

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan hasil dari rangkaian keadaan sosial politik karena sifatnya yang dinamis. Fatwa yang dikeluarkan MUI seringkali merupakan respon terhadap perkembangan baru yang terjadi orang yang meminta fatwa. Sejalan dengan Muzhar,

³⁶ Jainuddin, "Islam Dan Politik Ode Lama: Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno", *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2019), h. 240.

M.B. Hooker (1997) mengungkapkan peran utama MUI sejak saat itu periode berdirinya pada tahun 1975-1990 adalah untuk mendukung dan beberapa kasus melegitimasi kebijakan dan program pemerintah Dalam konteks negara, fatwa MUI hampir selalu didukung *umara*. *Umara* memperlakukan MUI sebagai institusi semi-negara dan representasi ulama. Peranan ini menguntungkan MUI karena semua pandangan agamanya dapat diklaim sebagai suara resmi pemerintah dan suara umat Islam Indonesia. MUI menggunakan fatwa sebagai alat diskursif untuk penegasan legitimasi aslinya dalam menentukan wacana keagamaan publik. Dengan fatwa dan kewenangannya, MUI menumbuhkan risalah baru, yaitu mainstream agama sekaligus memperkuat klaim ulama atas kekuasaan. MUI berhasil membangun dan menguasai wacana keberagamaan masyarakat, khususnya dalam fatwa tentang pemahaman meyakini. Dalam konteks ini, wacana yang menyesatkan menjadi wacana dominan atau mainstream MUI dibentuk oleh *umara* pada masa orde baru untuk menekan oposisi kelompok dan menciptakan kerukunan dan kerjasama dalam hubungan antar manusia Islam dan negara. Melalui fatwa dan kewenangannya, MUI mempromosikan wacana baru, yaitu agama mainstream. Ada relevansi peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pembentukan Wacana Islam masa orde baru tahun 1975-1998 membentuk perspektif untuk menjalin hubungan baik kerukunan ditengah masyarakat Indonesia.³⁷

Masa Reformasi, dalam masyarakat Indonesia, ulama dianggap sebagai panutan. Maka ulama dapat berperan sesuai dengan ajaran Islam akan mampu mengarahkan umatnya untuk kehidupan yang baik. Peran ulama dalam masyarakat sudah cukup posisi sosial-ekonomi dan politik yang berbeda akan lebih menambah peran mereka dalam membangun komunitas lingkungan. Awalnya, keberadaan ulama dikenal di dunia pondok pesantren, masjid, taklim serta mushola sebagai pendidik dan pengajar Islam tapi perannya nanti berkembang menjadi berbagai bidang kehidupan. Dengan berkembangnya karya ulama di berbagai bidang, bidang kehidupan masyarakat maka mereka dapat katakan peran ganda. Mereka menjadi tempat di mana hati orang-orang yang membutuhkan mengalir keluar bantuan berupa

³⁷ Subekty Wibowo, Hermanu Joebagio, Saiful Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah", *Jurnal CANDI*, Vol. 17, No. 1, (2018), h. 90.

nasehat tentang masalah pribadi dan keluarga. Misalnya masalah pribadi dibawa ke ulama meminta doa agar usahanya ingin sukses dalam pemilihan pemimpin dengan cepat kepala desa setempat, anggota DPRD dan Bupati ingin sukses datang ke ulama untuk memberitahu apa yang dia inginkan. Lalu ia meminta saran dan jalan keluar yang benar, mereka melakukannya dan mereka tidak lupa minta doa dari ulama.³⁸

Masalah lain diajukan ke ulama adalah hal-hal yang bersifat gaib, seperti jika ada orang yang dianggap sakit karena gangguan jin, ulama ditanya untuk mengusir jin dan mengobati pasien. Selain itu, ada peran ulama lainnya yaitu: Majelis Ulama Indonesia MUI yang lebih formal merupakan salah satu tempat dimana peran formal ulama dalam masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal Setidaknya ada tiga hal yang menjadi kegiatan ulama melalui MUI, yaitu penyiaran penasihat agama untuk klan yang berkuasa sebagai jembatan antara *umara'* dan umat. Selanjutnya menghidupkan kembali peran politik ulama. Di sisi lain, ulama yang berpolitik tidak bisa diharapkan dapat memainkan peran yang baik dalam dunia politik, makanya lebih baik bagi ulama memainkan peran politik yang lebih tinggi daripada hanya politik praktis, sehingga mereka lebih baik memimpin orang-orang dengan berpolitik secara santun dan islami.³⁹

Pada masa Kontemporer kehidupan masyarakat yang beragama, terutama dalam memimpin dan mengembangkan pemikiran moral dan keagamaan, relasi ulama dan *umara'* sangat menarik untuk mewujudkan pribadi yang utuh dan kemajuan baik lahir maupun batin. Aspek spiritual, Tokoh kunci ini ikut serta dalam kegiatan pembangunan untuk menyadari pentingnya kesejahteraan sosial. Dalam proses pelaksanaannya, bahkan para pemuka agama dapat memainkan peran yang lebih luas, tidak hanya dalam spiritual masyarakat, tetapi juga sebagai pemandu dalam segala aspek agama dan masyarakat, serta menjadi mediator dalam segala aspek pembangunan suatu negara. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa ulama bukan hanya orang yang mendalami agama, tetapi juga orang yang memiliki ilmu yang luas, sehingga dari ilmunya tersebut dapat ikut serta

³⁸ M. Hanulan Basyar, *Dinarnika Peran Ulama dalam Perpolitikan Nasional Pasca Orde Baru*, (t.t), h. 79.

³⁹ M. Hanulan Basyar, *Dinarnika Peran Ulama dalam Perpolitikan Nasional Pasca Orde Baru*, (t.t), h. 81.

dalam proses pembangunan untuk mewujudkan keyakinan beragama dan kesejahteraan masyarakat umum.

Terakhir, pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dapat digolongkan sebagai pemerintahan yang perlindungan kelompok minoritas yang berada di belakang. Selama pemerintahannya, terjadi kekerasan terhadap kelompok minoritas, termasuk kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Kasus penutupan paksa gereja juga terjadi pada masa pemerintahan SBY. Dalam kebanyakan kasus, kesalahan ditempatkan pada kelompok minoritas itu sendiri, padahal negara berkewajiban melindungi seluruh warga negara dari kekerasan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk sesama warga negara. Karena sesungguhnya demokrasi yang matang adalah demokrasi yang dapat mencegah kekerasan atas nama mayoritas. Hanya melalui penegakan hukum yang konsisten, pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kala atau Jokowi-JK dapat memperbaiki kelemahan SBY di masa pemerintahannya. Kepemimpinan Jokowi-Ma'rif Amin selama lima tahun terakhir telah menunjukkan wajah politik hukum yang berpihak pada kelompok Islam. Setidaknya beberapa kebijakan politik hukum Islam yang populis telah diberlakukan, seperti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri dan penerbitan sejumlah undang-undang bernuansa "Islam". Hubungan *umara'* dan ulama yang salah satunya diwujudkan melalui kebijakan politik syariat Islam, dapat dimaknai sebagai upaya mengakomodir negara terhadap kelompok-kelompok Islam, melalui penerbitan sejumlah produk perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. memiliki jiwa Islami. Selama masa kepresidenan Joko Widodo, banyak perubahan yang terjadi pada keadaan saat ini. Jika diketahui masyarakat hanya mengetahui bahwa ulama hanya terbatas pada pemuka agama atau pusat keagamaan, maka keikutsertaan ulama dalam urusan politik dan pemerintahan akan sangat menguntungkan masyarakat. Selama ada persyaratan politik yang memadai, seperti dukungan politik, partai politik, dan tujuan politik, ulama dapat berperan apa saja. Pada dasarnya tidak ada yang dapat menghalangi umat Islam untuk terlibat dalam politik. Kebijakan dan langkah-langkah agar sesuai dengan tujuan yang dicapai, seiring berjalannya waktu, ulama secara bertahap bergabung dengan kekuasaan pemerintahan negara, lupa bahwa mereka sebenarnya ulama, dan harus memberikan nasehat

kepada para pemimpin melalui agama. Justru karena masalah-masalah inilah kondisi saat ini terpenuhi.⁴⁰

G. Majelis Ulama Indonesia dari Masa ke Masa

Dalam menjalankan fungsi Majelis Ulama Indonesia, MUI memiliki alat tertentu untuk memberikan panduan kepada masyarakat. Setidaknya ada dua jenis media yang digunakan oleh MUI untuk memberikan panduan kepada masyarakat. Meski sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa sikap MUI sering terburu buru. Beberapa tokoh publik, termasuk wakil presiden Jusuf Kalla pernah mengkritik MUI dan merasa tidak senang dengan pendiriannya. Dua jenis alat legitimasi tersebut adalah fatwa dan wacana. Wacana terdiri dari Rekomendasi (Tausiyah), Peringatan (Tadzkirah), Instruksi/Amanat (Amanah), Pernyataan Sikap, Banding (Himbauan), dan Pemikiran (Sumbangan Pemikiran). Sedangkan fatwa memainkan peran penting dalam masyarakat. Fatwa memainkan peran yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perubahan bertahap hukum substantif Islam. Dalam hal otoritas agama, fatwa juga penting karena melalui media ini para MUI dapat mengekspresikan gagasan dan pendapat mereka mengenai hukum Islam. Dalam menggunakan fatwa yang diproduksi oleh ulama, orang mungkin tahu apa yang dilarang untuk mereka dan apa yang tidak. Dalam hal ini, fatwa berfungsi sebagai bukti bahwa ulama (atau otoritas agama) memiliki kemampuan untuk memberikan arahan kepada umat Muslim Indonesia. Sikap MUI sebagai organisasi terlihat ke dalam dua tahapan yakni masa awal pembentukannya saat rezim orde baru berlangsung dan kedua saat reformasi.⁴¹

Pada awal pembentukannya, sikap MUI di era Transisi, dan Orde Lama, hubungan ulama dan *umara'* jangan sampai renggang. Karena keduanya saling berkaitan. "Ulama itu adalah penerang dan penguasa adalah pengaman". peran ulama dan *umara'* adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ulama tanpa ada dukungan dari *umara'* dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak bisa mudah. Namun, bila ada dukungan dari *umara'* maka untuk menyerukan *amar ma'ruf*

⁴⁰ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2012), h. 105.

⁴¹ Pulungan J. Suyuthi, "Internalisasi Dan Akulturasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Tradisi Dan Budaya Masyarakat Indonesia," *Journal Humanika*, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 365.

(perintah baik) dan mencegah perbuatan *nahi mungkar* akan terasa mudah. Peran dukungan *umara'* kepada ulama ini sangat nyata untuk mencegah *nahi mungkar*. Sehingga peran ulama untuk berdakwah lebih. Untuk itu, perlu adanya hubungan sinergis dengan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan. Sebab, posisi ulama dan pemerintah (*umara'*) saling berkaitan dalam menjaga hubungan dalam *amar ma'ruf nahi mungkar*.⁴²

Sikap MUI di era Orde Baru tidak selalu berada di tangan pemerintah (*umara'*). Setelah 1982 MUI berada di bawah kendali pemerintah (*umara'*). Penerbitan pernyataan MUI dalam pemilihan umum dimulai pada tahun 1977 dan kemudian berlanjut pada tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meneliti kelima tahapan tersebut menunjukkan bahwa hanya pada tahun 1977 MUI tidak memberikan dukungan yang mencolok kepada pemerintah (*umara'*). Pada tahun-tahun berikutnya, dari 1982 hingga 1997, MUI jelas mendukung pemerintah. Tiga pernyataan (1982, 1992 dan 1997) menyebutkan nama Soeharto untuk melanjutkan posisinya sebagai Presiden Indonesia. Pada tahun 1987, meskipun MUI tidak menyebut Soeharto, ia menyatakan perlunya melanjutkan pemerintahan Orde Baru dan pentingnya partisipasi Muslim Indonesia dalam pemilihan. Kuatnya posisi Islam politik saat itu, dapat dikatakan merupakan imbas dari keterlibatan pemerintah dalam Islam politik yang tidak sekuat pada tahun 1980 dan seterusnya.⁴³

Pada masa Reformasi sikap MUI malah berbeda. MUI mengubah posisinya dari mendukung pemerintah (*umara'*) menjadi mendukung partai-partai Islam. Sikap ini dipengaruhi oleh melemahnya kekuatan pemerintah. Berbeda dari era Orde Baru, ketika kekuatan politik pemerintah sangat kuat, era Reformasi dicatat sebagai titik awal dari debat terbuka di mana kebebasan berbicara sangat dihormati. Perubahan ini, pada gilirannya, juga mempengaruhi sikap MUI yang segera mendukung partai-partai Islam dengan menyatakan bahwa umat Islam harus memilih hanya untuk kandidat Muslim. Selain itu,

⁴² Lihat Muhyiddin, "Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (mop)". *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 24, No. 1, (2014), h. 70.

⁴³ Alpizar, "Islam Dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Tentang Perubahan Masyarakat." (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010).

rekomendasi menunjukkan kembalinya aliran politik (politik aliran) yang terjadi hanya dalam pemilihan umum 1955.⁴⁴

Selama era Orde Baru, aliran politik tidak muncul karena tekanan pemerintah (*umara*) yang menerapkan Pancasila sebagai prinsip dasar tunggal. Rekomendasi ini juga menunjukkan melemahnya kekuatan MUI dari pengaruhnya terhadap perilaku memilih rakyat Indonesia. Kemenangan PDI-P dalam pemilihan umum tahun 1999 menunjukkan bahwa MUI tidak berhasil meyakinkan banyak Muslim untuk memilih partai-partai Islam. Fakta ini jelas mengalahkan salah satu tujuan MUI di balik taushiah pada 1999, yang bertujuan untuk menghambat peluang PDI-P untuk memenangkan pemilihan.⁴⁵

Pada pemilihan umum 2004 persis sama dengan pemilu 1999 dalam arti bahwa MUI tidak memberikan dukungan nyata kepada pemerintah seperti yang terjadi di era Orde Baru. Hal tersebut juga berbeda dari taushiah MUI dalam pemilihan umum 1999, yang secara khusus mendukung partai Islam dengan menyarankan bahwa Muslim Indonesia tidak boleh memilih calon non-Muslim. Dapat ditafsirkan bahwa sikap MUI dalam pemilihan umum 2004 adalah netral. Posisi ini diadopsi karena dua kondisi. Pertama, partai-partai Islam tidak lagi menggunakan masalah agama (Islam) dalam kampanye mereka. Kedua, semua tiket dalam pemilihan presiden memiliki kandidat (baik untuk presiden atau wakil presiden) dari berlatar belakang Muslim. Dibandingkan dengan sikapnya dalam pemilihan umum sebelumnya, fatwa MUI pada tahun 2009 tentang abstain suara dapat dianggap sebagai yang paling berbeda dan kontroversial. Sikap ini berbeda karena MUI sebelumnya tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang pemilihan umum tetapi hanya memberikan pernyataan atau rekomendasi. Ini juga menjadi kontroversial di antaranya karena reaksi banyak orang Indonesia yang mengkritik fatwa, tetapi juga karena penerbitan itu sendiri. Tidak jelas apakah fatwa. Dapat ditarik perbedaan sikap MUI di era Orde Baru dan era pasca-Orde Baru (Reformasi). Di bawah Orde Baru, MUI dapat dianggap bermain aman dengan mendukung pemerintah. Selama era itu, hanya dalam pemilihan

⁴⁴ Lihat Fadlurrahman Ashidqi, "Problem Doktrin Sekulerisme," *Jurnal KALIMAH*, Vol. 12, No. 2, (2014), h. 213.

⁴⁵ Khozainul Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Akademika*, Vol. 8, No. 2, (2014), h. 166-179.

umum 1977 MUI mengadopsi sikap netral. Pendekatan ini diambil karena tekanan pemerintah yang membatasi pergerakan politik MUI. Di era pasca Orde Baru, sebaliknya, sikap MUI dalam pemilihan umum ditentukan oleh perkembangan politik. MUI mengubah sikapnya dengan menjauhkan diri dari pemerintah dan memperbaiki keputusannya sesuai dengan konteks politik. Pengaruhnya di era Reformasi tidak sekuat seperti di zaman Orde Baru.⁴⁶

Secara umum, urgensi fatwa adalah untuk menjaga umat Islam agar prilakunya tidak keluar dalam koridor hukum Islam ketika menghadapi adanya perubahan sosial dan budaya dimasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan MUI untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila. Namun dalam perjalanannya fatwa-fatwa MUI mulai bergesekan dengan berbagai macam kepentingan, gesekan tersebut kerap terjadi dengan program pemerintah, kepentingan bisnis, budaya agama lain hingga paham-paham yang tidak sejalan dengan landasan sosial budaya Islam. Pada awal berdirinya, MUI tidak bermaksud menjadi sebuah organisasi yang meluncurkan program dengan sendirinya, tetapi lebih cenderung memberikan saran dan menjadi titik penghubung serta koordinasi. Namun, karena tuntutan perubahan sosial yang begitu kompleks, dimana saran saja tidak cukup, maka sejak tahun 1990 tujuan MUI telah berubah tidak hanya sebagai pemberi saran, lebih dari itu, secara bertahap mengeluarkan program sendiri, semisal program praktis yang meliputi pengiriman da'i ke daerah-daerah transmigrasi, membuat Bank Mu'amalah Indonesia, LPPOM dan pendirian Badan Arbitrasi Indonesia. Faktanya perbedaan pendapat, kepentingan, ideologi yang sangat beragam sulit untuk mendapatkan titik temunya. Cacian dan kritik tak pernah lepas dari perjalanan MUI dalam menerbitkan fatwa. Hal ini juga sejalan dengan perkataan imam Syafi'i bahwa "Keridlaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai". Independensi MUI yang mengeluarkan fatwa murni adalah atas dasar Al-Qur'an dan Hadits diperlukan untuk menciptakan keharmonisan yang sesuai dengan petunjuk agama Islam. Ada empat sikap dasar MUI yang perlu digaris bawahi dalam setiap aktivitasnya, yaitu pertama, keinginan untuk mendapatkan

⁴⁶ Musthafa Al-Zarqa, *Fatawa Musthafa Al-Zarqa*, Diedit oleh Muhammad Ahmad Makki (Damaskus: Dar al-Qalam, t.t), h. 37.

pengakuan dari masyarakat dan memiliki hubungan yang baik dengan organisasi Islam. Kedua, keinginan untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah. Ketiga, keinginan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat Muslim dalam pembangunan nasional. Keempat, keinginan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan kelompok agama non-Muslim Urgensi fatwa MUI dapat diterjemahkan menjadi dua hal yaitu peran dan pengaruh. Peran fatwa MUI mendeskripsikan respon MUI terhadap fenomena dan polemik yang terjadi di masyarakat terkait dengan kegiatan sosial budaya maupun kebijakan pemerintah dalam sudut pandang agama dalam wadah majelis ulama yang mewakili semua ormas Islam di Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam bentuk Surat Keputusan (SK) merupakan respon atas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh pemerintah, perorangan atau individu, atau institusi, atau respons atas kecemasan-kecemasan yang berkembang di masyarakat, seperti kasus perbedaan pendapat dalam menyikapi pemimpin non-Muslim. Ulama sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi dan Kontemporer sekarang ini, juga sering dilibatkan dalam upaya pemasyarakatan program pemerintah. Pentingnya melibatkan ulama dalam sosialisasi program pemerintah, karena masyarakat Indonesia, harus diakui, masih banyak yang bertindak sesuai fatwa atau arahan tokoh agama. Upaya pemasyarakatan tentang pentingnya protokol kesehatan untuk mencegah virus covid-19, misalnya, sangat membutuhkan peran ulama. Kita ingat bagaimana peran ulama sangat diperhitungkan dalam pemasyarakatan program keluarga berencana (KB) pada tahun 1970-an. Ketika itu banyak tokoh masyarakat yang menolak program KB karena menganggap bertentangan dengan ajaran agama. Akan tetapi, kini program KB telah diterima oleh masyarakat. Tidak ada lagi hambatan secara ideologis karena sebagian besar ulama telah memberi putusan hukum bahwa program KB dan kontrasepsi itu boleh dilakukukan, dengan syarat tidak terjadi pemandulan secara permanen. Pelibatan ulama dalam upaya memasyarakatkan program pemerintah itu bukan hanya karena mendalam ilmu mereka. Pengaruh ulama di tengah masyarakat tidak dapat diabaikan, karena dengan demikian memudahkan keterlibatan umat untuk mendukung. Umat memang sering menyandarkan perilaku dan keputusannya pada keyakinan agama mereka, selain patuh dan meneladani ulama. Peran strategis ulama memang tidak boleh diabaikan. Hal

ini mengingat posisi ulama sebagai pemimpin umat yang secara sinergis harus bersamaan dengan pemerintah dalam upaya menghadapi persoalan kebangsaan.⁴⁷

H. Relevansi Ulama dengan *Umara'* Perspektif Al-Ghazali dalam Konteks Politik Islam di Indonesia.

Pada masa politik di Soekarno dan Hatta, sejarah mencatat bahwa ulama yang berlatar belakang keagamaan Islam ini berperan penting dalam menghilangkan pengaruh politik komunisme (PKI: Partai Komunis Indonesia) pada akhir periode Soekarno. Dinamika politik orde lama menekan suara ulama, yang dianggap Soekarno kontra-revolusioner, dan orde baru pada masa Suharto, pada gilirannya, secara sistematis meminggirkan peran ulama. Mereka terpinggirkan karena kurangnya pemahaman penguasa dan ketakutan berlebihan terhadap gerakan politik Islam. Hangatnya hubungan ulama dengan *umara'* mengungkapkan dinamika yang menarik, apalagi jika kita memotretnya di era pasca kemerdekaan. Proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia berlanjut pada masa pasca kemerdekaan yang intens dan melibatkan peran penting para ulama dan menorehkan sejarah keefektifan peran *umara'* yang mereka banggakan dalam percaturan politik nasional era Orde Lama. Ternyata, kekuatan politik Partai Islam tidak hanya berhasil menjadi penyeimbang kekuatan politik yang cukup dalam menghadapi gempuran kaum Komunis, tetapi keberadaannya juga diakui dengan dibentuknya Departemen Penghubung ulama dan *umara'*. Dengan sejarah perjuangan kemerdekaan yang membanggakan, ulama dapat berbuat banyak untuk menyelesaikan berbagai persoalan etnis. Namun, para ulama mulai berkecimpung dalam politik yang sebenarnya, dan tidak banyak yang memiliki visi nasional seperti pendahulu mereka. Negara ini mengandalkan ulama, dan santri di masa depan untuk memainkan peran bangsa dan umat dalam misi politik seperti pendahulu mereka untuk menjaga keharmonisan negara Indonesia.⁴⁸

Terdapat dua pilar penting yang dapat menyelaraskan kehidupan di muka bumi, yaitu ulama dan *umara'*. Ulama

⁴⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: ELSAS, 2010), h. 19.

⁴⁸ Muhammad Ishak, "Hubungan Antara Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 2, (2014), h. 134.

biasanya sering di formulasikan dengan pemimpin formal, yang menentukan kebijakan yang harus dilaksanakan. Relasi ulama dan *umara'* dalam pembangunan peradaban dan kesejahteraan lebih menekankan pada bentuk relasi dalam menemukan permasalahan umat, mencari solusi dan mengaplikasikan dalam tataran nyata. Jika dalam Islam, tidak ada pemisahan antara rohani dan dunia, setiap Muslim adalah generasi Islam, dan mereka yang percaya pada Islam disebut Muslim dan orang-orang Islam dihadapan agama Islam memiliki kedudukan yang sama. Dalam Islam, tidak ada kekuasaan agama dalam arti ulama, dan tidak ada urusan dunia di luar agama, karena dalam Islam, agama dan negara adalah satu. Misalnya, politik memelihara urusan manusia dan juga merupakan salah satu hukum Islamnya, karena Islam adalah akidah dan sistem.⁴⁹ Ulama akan beribadah dan mengajarkannya, selain disibukkan dengan urusan politik, ia juga menyerukan ketaatan terhadap etika Islam dan pemeliharaan pelaksanaan sistem hukum Islam, baik dengan mengkritik penguasa, atau berdiskusi dengan penguasa, atau memberi saran kepada para pemimpin, atau mendidik anak-anak. Sebagai seorang ulama, selain bertindak sebagai penunggu mihrab dan penganjur taqwa, ia juga seorang pahlawan jihad dan panglima perang.⁵⁰

Ulama menggabungkan cinta dan usaha untuk memahami kehidupan dengan pemahaman khusus, mereka menggunakan pemahaman ini untuk menerangi pengelolaan dunia yang menjadi hak mereka, dan mendapatkan akhirat melalui upaya mereka. Tanpa ulama, manusia akan menjadi bodoh. Manusia di sini berasal dari semua lapisan masyarakat, termasuk penguasa yang akan dikuasai oleh saiton. Dari sini, ulama adalah berkah Allah bagi penduduk bumi. Rasulullah Saw bersabdah ketika diceritakan kepadanya tentang dua orang, yang satu ahli ibadah dan satunya orang alim: “keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan saya atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya Allah, Malaikatnya, penghuni langit dan bumi hingga semut di dalam lubangnyanya, dan hingga ikan di

⁴⁹ Arfriani Maifizar, *Peranan Ulama dan Umara' dalam Memartabatkan Syariat Islam di Aceh*, (Aceh Barat: Universitas Teuku Umar, 2017), h. 388.

⁵⁰ Muhammad Ishak, “Hubungan Antara Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 2, (2014), h. 123.

dalam air, mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia”.⁵¹

Kewajiban yang dilakukan ulama untuk mengkritik penguasa adalah hak untuk mengingatkan penguasa dalam hukum Islam dan menghukum mereka yang tidak melaksanakan atau tidak meluangkan waktu untuk melakukannya. Padahal, mengkritik dan mengendalikan perkataan dan perbuatan penguasa yang melanggar syariat Islam tidak berarti merekam kepribadiannya, karena setiap orang pernah berbuat salah. Jadi mengkritik dan mengendalikan mereka dapat memperbaiki kebengkokan mereka dan memungkinkan mereka untuk berjalan dengan benar.

Ulama selalu memberikan yang terbaik kepada *umara'*, hingga mereka rela mendapatkan kesulitan dan melakukan segala macam cara guna menjalankan tugas syariat ini. Nasihat kepada penguasa bahkan lebih penting, karena menasihati mereka akan bermanfaat bagi mereka dan rakyatnya. Oleh karena itu, para ulama salaf percaya bahwa selama mereka tidak meragukan dan menentang kitab suci Allah atau mengubah hukum Syariah, lebih baik memberikan nasihat kepada para penguasa daripada memprotes mereka atau menyingkirkan kendali mereka. Hasan Al-Basri berkata: “Mereka mengabaikan urusan kami, seperti shalat, membayar pajak, menjaga benteng dan melanggar batas-batas hukum syariah. Demi Allah, agama tidak akan tegak kecuali dengan mereka. Demi Allah, kebaikan yang diberikan oleh Allah karena mereka, lebih besar dari penyelewengan mereka”.⁵²

Al-Ghazali menghadap seorang penguasa bernama Sanjar bin Malik Syah As-Saljuki untuk mencegah kezaliman dari kaum Muslimin, baik dalam harta maupun nyawa mereka. Diantara perkataannya kepada Sanjar adalah “Sangatlah kasihan, orang-orang Islam yang berhutang hampir tenggelam dalam musibah dan bencana, sementara sanak kerabatmu hampir tenggelam dengan kalung emas”. Sebagian ulama salaf menghadap para penguasa dengan niat berbeda, Imam Malik bin Anas melakukan hal ini dan berkata, “hak setiap orang Muslim atau seseorang yang diberi ilmu dan pemahaman dalam hatinya, untuk menghadap setiap pemimpin, meyerunya kepada kebaikan dan

⁵¹ Abdullah, “Hubungan Agama Dan Negara: Konteks KeIndonesiaan”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, No. 2, (2014), h. 33.

⁵² Jamauddin Al-Qasimi, *Ihya' Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, (Bekasi: Darul Falah, 2010), h. 601-602.

mencegahnya dari keburukan, sehingga menghadapnya itu tidak sama dengan menghadap ulama-ulama. jika itu dilakukan, maka tidak ada lagi kemuliaan yang melebihi kemuliaannya”.⁵³



⁵³ Abdul Aziz Al-Badri, *Hitam Putih Wajah Ulama & Penguasa*, (Jakarta, Darul Falah: 2010), h. 78.